



Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Internal sebagai Pemoderasi: Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kepulauan Mentawai

Enjela Efridawati¹, Agussalim¹, Yuli Ardiany¹

¹Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

✉ enjelaefridawati@gmail.com*

Article Information:

Received April 21, 2025

Revised Mei 15, 2025

Accepted Juni 20, 2025

Keywords: *Partisipasi anggaran, akuntabilitas publik, kinerja manajerial, pengawasan internal*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kontigensi. Sumber data diambil dari 40 informan melalui wawancara mendalam yang dipilih menggunakan teknik *total sampling*, seluruh informan merupakan kepala bidang, kepala bagian, kepala seksi, dan kepala sub bagian, yang merupakan seluruh pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kabupaten kepulauan Mentawai. Seluruh hasil wawancara kemudian di analisis secara tematik menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai). Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data awal untuk penelitian berikutnya dalam mengkaji permasalahan dalam konteks dan isu yang berbeda.

PENDAHULUAN

Sebagai organisasi sektor publik diuntut memiliki kinerja yang baik untuk kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah tanggap dengan lingkungannya, dengan cara memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada suatu struktur organisasi pemerintahan. Pemerintah di pusat maupun daerah harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya (Nengsy, 2017).

How to cite:

Efridawati, E. Agussalim. Ardiany, Y. (2025). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan Internal sebagai Pemoderasi: Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kepulauan Mentawai. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 51-59.

E-ISSN:

3046-9120

Published by:

The Institute for Research and Community Service

Kinerja manajerial merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi, khususnya organisasi sektor publik yang mana kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan pelayanan masyarakat (Apriyanti, 2017). Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Faktor yang menyebabkan kinerja pemerintah masih rendah, diantaranya sistem pengelolaan keuangan masih lemah, dari proses perencanaan, dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan APBD, pertanggung jawaban berupa laporan hasil pelaksanaan APBD serta pengawasan. Dalam hal ini, partisipasi anggaran memainkan peran sentral dalam mendapatkan penerimaan atas tujuan anggaran.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggung jawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat. untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan internal ini diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana, pengawasan intern juga meningkatkan efisiensi, mencegah timbulnya kerugian atas aktiva, mempertinggi tingkat keandalan data dalam laporan keuangan dan mendorong dipatuhinya hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

METODE

Penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan pendekatan kontigensi (Sujana, 2018; Husin, et al., 2011). Sumber data diambil dari empat puluh orang informan melalui wawancara mendalam yang dipilih menggunakan teknik *total sampling*, adapun informan yang dipilih telah memenuhi. Untuk memenuhi kriteria sebagai seorang informan tersebut, maka seluruh informan merupakan seluruh pegawai tetap organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di kabupaten kepulauan Mentawai. Setelah wawancara dan penyebaran kuesioner selesai di ambil kepada semua informan maka dilakukan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, Proses analisis ini peulis lakukan menggunakan bantuan komputer melalui program IBM SPSS 21 for windows (Hafizi et al., 2022; Nadhirah et al., 2023; Arifin et al., 2024; Engkizar et al., 2024). Menurut Sugiyono (2015:93) bahwa untuk mengukur pendapatan atau persepsi seseorang atau kelompok sosial dalam suatu penelitian menggunakan skala pengukuran likert. Metode penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial atau pemahaman dari suatu realita dan merincikan menjadi variabel yang saling berkaitan dengan tujuan memperoleh pemahaman dan makna dari masalah yang akan diteliti. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase jawaban responden terhadap kedua variabel yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

**Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.09718857
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.067
	Negative	-.090
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui nilai asymp sig signifikan sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	45.840	12.084		
Partisipasi anggaran	.137	.160	.743	1.346
Akuntabilitas publik	.298	.204	.743	1.346

Nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas di bawah 10 (sepuluh) yaitu 1,346 sedangkan nilai perhitungan *tolerance* dari *Collinearity Statistics* Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik sebesar 0,743 hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,10 yang artinya tidak ada korelasi antara variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi

Uji *Heteroskedastisitas*

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients		
Model	Sig	Kesimpulan
1 (Constant)	.201	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Partisipasi Anggaran	.250	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Akuntabilitas Publik	.679	Tidak terjadi heteroskedastisitas

a. Dependent Variabel: ABS_RES

Berdasarkan tabel 3 Adapun hasil regresi antara variabel independe dengan absolut residualnya menunjukan bahwa koefisien dari masing-masing variable independent tidak ada yang signifikan (taraf signifikansi > 0,05) dimana partisipasi anggaran

memiliki tingkat signifikan $0,250 > 0,05$ dan akuntabilitas publik memiliki tingkat signifikansi $0,679 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisi Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1 (Constant)	45.840	12.084	
PA	.137	.160	
AP	.298	.204	

a. Dependent Variabel: Kinerja Manajerial

Berdasarkan tabel 4.dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$KM = 45.840 + 0.137 PA + 0.298 AP$$

Nilai konstanta sebesar 45,840 hasil ini menunjukkan bahwa jika variabel partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik bernilai (0) satuan maka kinerja manajerial adalah sebesar 45,840 satuan. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Anggaran adalah sebesar 0,137 hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan satu satuan variabel partisipasi anggaran maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,137 satuan. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas Publik adalah sebesar 0.298 hal ini menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan satu satuan variabel Akuntabilitas Publik maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0.298 satuan.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Table 5 Moderated Regression Analysis (MRA)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24.557	77.198		.779	.078
PA	.214	1.710	3.568	1.880	.069
AP	.373	1.579	1.199	.870	.390
PA.PI	.037	.020	5.622	2.814	.009
AP.PI	.017	.019	2.118	1.878	.003
PI	.396	1.044	4.161	3.253	.386

a. Dependent Variable: KM

$$KM = 24,557 + 0,214 PA + 0,373 AP + 0,037 PA*PI + 0,017 AP*PI + 0,396 PI + e$$

Dari persamaan regresi dapat diuraikan sebagai berikut. Nilai α (konstansta) diasumsikan bahwa tanpa ditambahkan variabel PA, AP dan PI maka Kinerja Manajerial meningkat sebesar 24.557. Apabila partisipasi anggaran mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi pengawasan internal dianggap tetap maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,214 satuan. Apabila akuntabilitas publik mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi pengawasan internal dianggap tetap maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,373 satuan. Apabila partisipasi anggaran dengan pengawasan internal sebagai pemoderasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,037 satuan. Apabila akuntabilitas publik

dengan pengawasan internal sebagai pemoderasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,017 satuan. Apabila pengawasan internal mengalami peningkatan sebesar satu satuan dengan asumsi partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik dianggap tetap maka akan meningkatkan kinerja manajerial sebesar 0,396 satuan. Berdasarkan tabel 5 hasil dari pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)* sebagai berikut.

Pengaruh pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara partisipasi anggaran (PA) terhadap kinerja manajerial

Berdasarkan pada hasil uji statistik (uji T) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai pemoderasi diperoleh nilai T_{hitung} sebesar $2,814 > T_{tabel}$ 1,68709 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya pengawasan internal (PI) mampu memoderasi hubungan pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Dengan kata lain hipotesis ke tiga yang menyatakan “pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial”. **Diterima.**

Pengaruh pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan akuntabilitas publik (AP) terhadap kinerja manajerial

Berdasarkan pada hasil uji statistik (uji T) menunjukkan bahwa partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai pemoderasi diperoleh nilai T_{hitung} sebesar $1,878 > T_{tabel}$ 1,68709 dan memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya pengawasan internal (PI) mampu memoderasi hubungan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. Dengan kata lain hipotesis ke empat yang menyatakan “pengawasan internal dapat memoderasi akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial”. **Diterima.**

Koefisien Determinasi

tabel 6 Uji R Square

Model summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.434 ^a	.188	.663	6.21869

Dari tabel 6 Hasil nilai koefisien determinasi (*Adjusted R square*) = 0,663 atau 66,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independent yaitu partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik yang digunakan menjelaskan variabel dependent kinerja manajerial yang sebesar 66,3%. sedangkan sisanya di jelaskan dalam variabel-variabel lain diluar model penelitian ini yaitu sebesar 33,7%

Uji T (Parsial)

Tabel 7

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	45.840	12.084		3.794	.001
PA	.137	.160	.152	2.855	.010
AP	.298	.204	.260	2.398	.015

a. Dependent Variabel: Kinerja Manajerial

Hasil uji t pada tabel 7 di atas dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut. Hasil pengujian variabel Partisipasi Anggaran mempunyai t_{hitung} sebesar $2,855 > t_{tabel}$

1,68709 dan nilai signifikansinya sebesar $0,010 < 0,05$ maka secara parsial partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan kata lain **H₁** "partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial" **Diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran maka akan meningkatkan kinerja manajerial yang tinggi. Hasil pengujian Akuntabilitas Publik mempunyai t_{hitung} sebesar $2,398 > t_{tabel}$ 1,68709 dan nilai signifikansinya sebesar $0,015 < 0,05$ maka secara parsial akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan kata lain **H₂** "Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial" **Diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial karna didalam terdapat prinsip pertanggungjawaban.

Uji F (Simultan)

Tabel 8

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	314.253	4	78.563	11.032	.000 ^b
	Residual	1353.522	97	38.672		
	Total	1667.775	99			

a. Dependent Variable: KINERJA MANJERIAL

b. Predictors: (Constant), moderasi_2, PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, moderasi_1

Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai F hitung 11,032 > dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Dengan f_{tabel} sebesar 3.252 dari hasil di atas dapat dilihat bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $11,032 > 3,252$. Hal ini berarti secara simultan Partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan kata lain **H₃** "Partisipasi anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial" **Diterima**.

PEMBAHASAN

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Hasil penelitian ditemukan nilai t hitung variabel partisipasi anggaran 2,855 dan nilai ($sig = 0,010$ t_{tabel} atau $2.855 > 1.687$ maka variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten kepulauan Mentawai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jasintha (2019) yang menemukan adanya pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial perusahaan manufaktur yang ada di wilayah jawa barat tengah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Hasil penelitian ditemukan nilai t hitung variabel Akuntabilitas Publik 2.389 dan nilai ($sig = 0.015 < 0,05$). Dengan $df = 40-3=37$ diperoleh t_{tabel} sebesar 1.687 dari hasil di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $2,389 > 1.687$ maka variabel Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mukaromah (2018) bahwa dengan adanya akuntabilitas publik, maka aparat pemerintah daerah

memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja aparat pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun eksternal. Semakin akuntabel suatu pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan Internal Memoderasi Hubungan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penelitian ini berdasarkan uji moderated regression analysis (MRA) diperoleh nilai moderasi 1 (perkalian antara partisipasi anggaran dengan pengawasan internal) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,009 < \text{dari } 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan anggaran dan pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengawasan diperlukan pada setiap tahapnya bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2011). Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mukaromah (2018) yang menyatakan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial OPD.

Pengawasan Internal Memoderasi Hubungan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penelitian ini berdasarkan uji moderated regression analysis (MRA) diperoleh nilai moderasi 2 (perkalian antara akuntabilitas publik dengan pengawasan internal) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < \text{dari } 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi hubungan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. Masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintahan daerah, sehingga jalannya pemerintah dapat berlangsung dengan baik (Mutathahirin et al., 2020). Jika kurangnya pengawasan maka pelaksanaan APBD tidak terealisasi dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. Adanya pengawasan internal, kinerja aparatur pemerintah daerah akan lebih disiplin dan pencapaian target akan tercapai, karena aparatur selalu di monitoring. Sehingga laporan akuntabilitas publik akan lebih terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban dan dapat menimbulkan implikasi yang luas bagi masyarakat, serta pemerintah daerah yang accountable (Baidar et al., 2023). Dengan pengawasan internal, maka pelaksanaan APBD dapat terealisasi dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. Dengan kewajiban pemegang Amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulisa (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan internal pemerintahan dapat mempengaruhi akuntabilitas daerah terhadap kinerja manajerial.

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah

Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan hasil uji f diketahui bahwa nilai $F_{hitung} 11.032 > F_{table} 3.252$ dengan nilai signifikan 0.000 .

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengawasan Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai).

SARAN

Bagi pemerintahan daerah diharapkan supaya pengawasan internal ini ditetapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalisir hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana dan lebih mempertingkat keandalan pengolahan data dalam laporan keuangan, serta lebih mematuhi hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen maupun moderating untuk mengukur kinerja manajerial, ataupun penelitian selanjutnya disarankan membedakan objek penelitian sehingga dapat meneliti ditempat lain dengan tujuan yang sama.

REFERENSI

- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep Dan Indicator)*. Riau: Zanafa Publishing
- Agussalim Manguluang, 2016 *Statistik*. Ekasakti Press
- Annisa, F., Sariningsih, E., & M. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Profesionalisme Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Pesawaran). *Jurnal ilmiah akuntansi rahmaniyah*, 3(2) Retrieved.
- Apriyanti, H, W. (2017), Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan motivasi 16 kerja sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal akuntansi indonesia*. Vol.6, No.2, Hal.141-156
- Arifin, Z., & Rizaldy, M. (2023). Pengaruh Etos Kerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan PT.Surya Segara Safety Marine. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5.
- Baidar, B., Mutathahirin, M., & Fitriani, F. (2023). Implementation of Card Sort Learning Media in Islamic Education Class in MIN. *Khalaqa: Journal of Education and Learning*, 1(2), 1-10.
- Djiloy, N. L. (2016). Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. *E Jurnal Katalogis*, 4(6), 70– 82
- Engkizar, E., Jaafar, A., Sarianto, D., Ayad, N., Rahman, A., Febriani, A., ... & Rahman, I. (2024). Analysis of Quran Education Problems in Majority Muslim Countries. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, 3(1), 65-80.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: BP Universitas Diponegoro
- Hansen dan Mowen. 2017. *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat. Jakarta
- Heskil, Petriana., Danik Tri Purwanti, dan Anni Fidayati. 2017. Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Magelang). *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, Vol. 15 No. 2.
- Imambarudin, 2019. *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja*: Depublish
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Mardiasmo. Yunita, & chirtianingrum (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Meirina, E., & Aziora, G. R. (2020). Pengaruh Partisipan Anggaran dan Akuntansi Pertanggung Jawaban terhadap Kinerja Manajerial PDAM Kota Padang. *Jurnal Pundi*, 4(2).
- Mukaromah, U., & Wahyu, P. 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Desentralisasi, Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan

- Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Karanganyar). Doctoral Dissertation, Iain Surakarta
- Mutathahirin, M., Hudamahya, A., & Hamdi, H. (2020). Community Assessment of Salafi Studies in the City of Padang. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 3(2), 47-55.
- Nadhirah, A. N., Kurniawati, T., & Nor, Z. B. M. (2023). Analysis of the Influence of Investment in Education and Health on Economic Growth in Malaysia. *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)*, 6(2), 65–7
- Nengsy, H (2017). pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas terhadap kinerja pt.perkebunan nusantara v, pekanbaru. *Jurnal akuntansi dan keuangan* 6(1).
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Sari, E.J.O.2016.Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran,akuntabilitas publik, desentralisasi,dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah (Studi pada skpd Kabupaten Kuantan Singingi). *Jom Fekom*, 3(1), 380-393
- Setiyawan, Hari Eka dan Muhammad Safri. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 No. 1.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). CV ALFABETA
- Taufik, Taufeni, Yusralaini, dan Y. Anisma. 2017. Analysis of factors influence in realization of good governance (Study on SKP (Tax Assessments) Pekanbaru City). *International Journal of Applied Business and Economic Research*. Vol. 15 No. 15. 279- 290
- Triani, A. A. A. O., & Sujana, K. (2018). Budaya Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Penganggaran Pada Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 30–50.
- Yulisa, Febri, Vince Ratnawati, dan Taufeni Taufik. 2020. The Factors Affecting Regional Financial Accountability: Organizational Commitment as Moderating Variables (Study on Rokan Hilir District Government OPD). *International Journal of Economics, Business, and Applications*. Vol. 4 No. 2. 61-73.

Copyright holder:

© Efridawati, E. Agussalim. Ardiany, Y.

First publication right:

Jurnal Riset Akuntansi

This article is licensed under:

CC-BY-SA